

**Pendampingan BLUD Kesehatan dalam Penyusunan Posisi Keuangan
di Kabupaten Musi Banyuasin**

Nilam Kesuma^{1*}, Aspahani², Eka Meirawati³, Asfeni Nurullah⁴

^{1,2,3,4}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

*correspondent email: nilamkesuma@fe.unsri.ac.id

Vol. 1 No. 1 (2022): Sriwijaya Accounting Community Services

ISSN: 2987-310X

Abstract – One of the UPTD Regional Apparatus Work Units that can be transformed into a BLUD is the Puskesmas. The UPT of the Health Service in Musi Banyuasin Regency (MUBA) has not yet implemented the Financial Management Pattern of the Regional Public Service Agency (PPK-BLUD), so its service performance is not optimal and inflexible in meeting community satisfaction. The target audience chosen are the managers and treasurers of the puskesmas who are heading to become PPK of the BLUD Puskesmas in Musi Banyuasin Regency as many as 39 people. The implementation of this service activity is carried out within a period of 2 months starting from a survey, providing training for 2 days and continuing with direct assistance. The implementation of this Community Service activity is carried out using the lecture, tutorial, and discussion methods. The systematic implementation of this service activity is carried out in a blended manner, which is partly offline and partly online. Based on the evaluation designed to assess the success of the implementation of this service, it was seen that there was an increase in participants' knowledge. Limited resources are owned because not all BLUD officials who prepare financial statements have an accounting education background.

Keywords: Public sector accounting, financial statement, Regional Public Service, Public health center

PENDAHULUAN

Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK)-BLUD berkenaan dengan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum adalah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Namun, pada saat ini tidak hanya Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus saja yang berpeluang untuk mengimplementasikan PPK-BLUD, puskesmas juga berpeluang setara untuk mencecap asam manisnya status BLUD, di samping berkewajiban menyusun RBA, BLUD Puskesmas juga harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 13 Tahun 2015 yang efektif 2016. Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas. Secara khusus pelaporan keuangan BLUD berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas laporan atas sumber daya yang dipercayakan dengan menyediakan informasi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas puskesmas, serta potensi untuk membiayai kegiatan puskesmas.

Di era milenial ini, tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memiliki standar mutu sudah tidak dapat ditawar lagi. Pemerintah daerah harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan terpenuhinya harapan masyarakat, tentu kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan semakin tinggi, karena publik merasa puas kebutuhannya dapat terpenuhi. Stigma masyarakat

terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dinilai kurang mampu bersaing dengan swasta, kurang transparan, tatakelola kurang baik, pendanaan terbatas, sumber daya manusia kurang memadai dan disiplin yang terbatas. Hal ini didukung dengan seperangkat perundangan dan adanya peraturan mengenai pengelolaan keuangan yang telah memadai, namun mengenai kualitas laporan keuangan yang belum sesuai. Banyak kasus-kasus yang terjadi mengenai buruknya kualitas laporan keuangan puskesmas di Indonesia masih menjadi isu menarik yang perlu di kaji lebih dalam. Kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI), serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi. Pemahaman SAP yang kurang dan lemahnya SPI dapat berimplikasi pada kualitas laporan keuangan yang di buat oleh setiap puskesmas. Laporan keuangan dapat dikatakan memiliki kualitas nilai informasi yang baik jika sistem pengendalian internal baik. Dijelaskan dalam pasal 12 UU Nomor 15 Tahun 2004 yang berbunyi "Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah."

Salah satu UPTD Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dapat ditransformasikan sebagai BLUD adalah Puskesmas yang merupakan unit kerja Dinas Kesehatan yang merujuk pada Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan memenuhi syarat-syarat: Teknis, Substantif, dan Administratif. Guna memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, khususnya persyaratan Administratif berupa dokumen antara lain: Pola Tata Kelola, Renstra, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Laporan Keuangan Atau Prognosis/Proyeksi Keuangan. Berdasarkan data. Banyak UPT Dinas Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sehingga kinerja pelayanannya belum optimal dan tidak fleksibel dalam memenuhi kepuasan masyarakat. Maka UPT Dinas Kesehatan Kabupaten MUBA perlu dipersiapkan agar dapat memenuhi persyaratan penerapan BLUD secara substantif, teknis dan administratif, dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, salah bentuk persiapannya melalui On the Job Training.

Berdasarkan hasil survey, wawancara dan diskusi bersama mitra puskesmas, dapat diidentifikasi bahwa tuntutan yang dihadapi puskesmas saat ini adalah: Puskesmas diwajibkan menggunakan pencatatan akuntansi berbasis akrual, semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015. Pencatatan akuntansi berbasis akrual pada puskesmas merupakan sesuatu yang baru sehingga membutuhkan kompetensi dan keahlian khusus dalam menjalankannya. Dari hasil survey dan pengamatan secara langsung pada puskesmas yang menjadi, aparat puskesmas belum memahami dan memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Kondisi ini diharapkan dapat diperbaiki dengan adanya kemampuan aparat dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

METODE

Khalayak sasaran yang dipilih adalah pengelola dan bendaharawan puskesmas yang menuju menjadi PPK Puskesmas BLUD yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 39 orang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan yang dimulai dari survey, pemberian pelatihan selama 2 hari dan dilanjutkan dengan pendampingan langsung. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari di salah satu perwakilan puskesmas yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Puskesmas Lumpatan. Sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan kegiatan administratif berupa perijinan, dan undangan peserta pelatihan. Peserta pelatihan ini adalah pengelola dan bendaharawan puskesmas yang menuju menjadi PPK Puskesmas BLUD yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin.

Sebelum melaksanakan pemberian materi, terlebih dahulu tim melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan, disini tujuannya adalah untuk mengetahui data berapa banyak puskesmas yang ada di

Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian, tim mencoba mendatangi beberapa puskesmas yang ada di sekitar Kota Sekayu untuk melihat cara mereka melakukan penyusunan pelaporan keuangan dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban belanja mereka. Pada saat pelaksanaan kunjungan ini, kami juga mencoba mencari informasi mengenai kesulitan atau permasalahan yang mereka hadapi saat pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tersebut.

Langkah berikutnya yang kami lakukan adalah membuat jadwal untuk memberikan materi terkait penyusunan laporan keuangan. Adapun materi yang diberikan adalah pengenalan pos-pos laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan, cara penyusunan neraca awal, pencatatan harian atas transaksi keuangan yang terjadi di puskesmas

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan secara *blended*, yaitu sebagian offline dan sebagian online. Adapun metode pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut:

1. Peserta diberikan Penjelasan mengenai pentingnya menyusun Laporan Keuangan sesuai standar sebagai dasar perhitungan pajak yang terhutang
2. Peserta pelatihan diberikan materi Dasar-dasar Akuntansi, Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas dan tata cara perhitungan, pembayaran, pengisian dan pelaporan pajak serta pemanfaatan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah.
3. Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk menyusun Laporan Keuangan dan menghitung sendiri jumlah pajak terhutang dan jumlah insentif yang dapat mereka klaim. Selain itu, peserta dapat mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang mereka hadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan ini terdiri dari 3 sesi utama. Pada sesi pertama yaitu pengenalan akuntansi secara umum dengan materi dasar-dasar akuntansi, penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang dikhususkan untuk BLUD dan penyelesaian kasus, yang diharapkan dengan praktek langsung penyelesaian kasus peserta pelatihan benar-benar dapat memahami materi pelatihan yang telah diberikan dan dapat mengaplikasikannya dengan kondisi puskesmas. Pada sesi kedua, praktek langsung penyelesaian kasus peserta pelatihan benar-benar dapat memahami materi pelatihan yang telah diberikan. Kemudian dilanjutkan membahas tentang laporan-laporan akuntansi, contoh-contoh kasus dan penyelesaiannya.

Berbagai peraturan yang ada saat ini, mengharuskan manajemen Puskesmas untuk menyajikan laporan keuangan secara berkala. Hal ini bergantung pada bentuk Puskesmas, apakah mengacu sebagai PPK-BLUD atau sebagai SKPD. Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas organisasi yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi dan pertanggungjawaban manajemen.

Konsep akuntansi akrual menjadi panduan Puskesmas dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini sudah dijelaskan dalam PP 71 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Dalam pasal 1 ayat (8) PP 71 Tahun 2010, disebutkan bahwa SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui :

- a) Pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual,
- b) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Hal ini juga telah sejalan dengan PERMENDAGRI 61 tahun 2007 maupun PERMENDAGRI 64 tahun 2013. Artinya, Puskesmas yang telah menjadi PPK-BLUD ataupun belum (sebagai SKPD) tetap wajib menyajikan laporan keuangan secara berkala secara akrual.

Langkah awal dalam memulai menyusun laporan keuangan yang baik di PUSKESMAS adalah dengan membuat "neraca awal". Neraca awal akan menunjukkan keadaan posisi keuangan puskesmas terutama kekayaan dan sumber dana pada saat neraca dibuat. Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan konsep akuntansi akrual, neraca awal harus dibuat terlebih dahulu

sebagai dasar dalam memulai. Pembuatan neraca awal memang tidak gampang dan membutuhkan berbagai usaha dan proses yang terus-menerus. Di samping itu, juga diperlukan komitmen manajemen terutama dalam menetapkan tanggal pisah batas (cut off) saat neraca awal dibuat. Dalam konteks ini, dibutuhkan dukungan semua pihak untuk melakukan inventarisasi baik assets maupun kewajibannya.

Alur penyusunan laporan keuangan pada BLUD diawali dari bagian akuntansi menerima menerima BKK (Bukti Kas Keluar) yang dilampiri SPJ, SP2D, SPM, SPP dan Nota Dinas dari bendahara pengeluaran dan menerima BKM (Bukti Kas Masuk) dari bendahara penerimaan. Bagian akuntansi kemudian memverifikasi bukti transaksi yang diterimanya dan memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar telah terjadi.

Setelah verifikasi bukti transaksi dilakukan, bagian akuntansi kemudian akan mencatat bukti transaksi kedalam jurnal-jurnal. Setelah semua transaksi dijurnal, bagian akuntansi kemudian akan melakukan posting pada buku besar. Sebelum melakukan posting akuntan melakukan pencatatan pada buku pembantu. Namun, prosedur pencatatan pada buku pembantu ini merupakan prosedur yang bersifat *optional* yang artinya tidak semua rekening memerlukan prosedur ini. Prosedur ini hanya dilakukan pada rekening-rekening tertentu yang memerlukan perincian. Buku Pembantu (*subsidiary ledger*) merupakan catatan yang digunakan untuk merinci rekening-rekening tertentu yang memerlukan penjabaran.



Gambar 1. Diskusi dan Pembahasan Kasus

Pemostingan merupakan proses pemindahan ayat jurnal (informasi dan jumlah rupiah) dari buku jurnal ke buku besar (*ledger*). pemostingan dapat dilakukan dengan dasar waktu tertentu seperti harian, mingguan, atau bulan. Setelah posting buku besar telah selesai dilakukan, maka saldo akhir yang ada dibuku besar disusun dalam bentuk neraca saldo (sebelum penyesuaian).

Pada akhir periode akuntansi, sebelum disusunnya laporan keuangan, terlebih dahulu dilakukan penyesuaian untuk akun-akun tertentu yang perlu dilakukan penyesuaian seperti persediaan. Setelah melakukan penyesuaian, kemudian bagian Akuntansi menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah neraca saldo setelah penyesuaian dibuat bagian akuntansi kemudian telah dapat menyusun laporan keuangannya.

Dihari kedua pelatihan, peserta pelatihan diajak bersimulasi terkait penyusunan neraca awal. praktek langsung penyelesaian kasus peserta pelatihan benar-benar dapat memahami materi pelatihan yang telah diberikan. Pelatihan di hari ketiga membahas tentang laporan-laporan akuntansi, contoh-contoh kasus dan penyelesaiannya. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan beberapa contoh kasus yang akan mereka hadapi setiap hari. Pada saat pendampingan penyusunan neraca awal ini, tim didampingi dengan mahasiswa yang sebelumnya sudah kami training

Tahapan monitoring dilakukan di tahapan ketiga untuk memastikan apakah pelatihan dan pendampingan yang diberikan sudah dapat menjawab kebutuhan puskesmas yang menuju ke BLUD akan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sudah dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan peraturan BLUD. Berdasarkan test / evaluasi yang dirancang untuk menilai kesuksesan pelaksanaan acara pelatihan ini, terlihat ada peningkatan pengetahuan peserta.



Gambar 2. Diskusi dan Tanya jawab dengan peserta

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki juga dipengaruhi oleh adanya kenyataan bahwa tidak semua pejabat BLUD yang bertanggung jawab sebagai bendahara maupun penyusun laporan keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Mayoritas tenaga bendahara dan penyusun laporan keuangan pada puskesmas BLUD dijabat oleh seorang tenaga kesehatan yang juga melakukan kegiatan pelayanan kesehatan pada puskesmas tersebut. Sehingga, tidak semua orang yang menduduki jabatan tersebut dapat memahami keterkaitan antar laporan keuangan dengan mudah.

Kendala lain dalam penyusunan neraca awal biasanya memang terletak pada pengumpulan data, terutama pada data persediaan dan aktiva tetap. Hal ini dikarenakan puskesmas harus melakukan stock opname atau pemeriksaan fisik dengan catatan. Namun sebelumnya, harus ada komitmen dalam menentukan tanggal pisah batas saat penyusunan neraca awal. Setelah itu, jumlah dan nilai aktiva (aktiva lancar dan aktiva tetap), kewajiban dan ekuitas yang dimiliki. Proses ini dilakukan untuk mengetahui posisi keuangan puskesmas pada saat neraca dibuat. Penyusunan neraca awal ini dilakukan apabila puskesmas baru pertama kali menyusun laporan keuangan misalnya puskesmas yang baru menjadi BLUD.

KESIMPULAN

Kegiatan dimulai dengan diskusi ringan dengan mendengarkan keluhan atau kesulitan yang mereka hadapi. Secara umum, mereka kurang memahami pengelompokan dokumen. Tahapan monitoring dilakukan di tahapan ketiga untuk memastikan apakah pelatihan dan pendampingan yang diberikan sudah dapat menjawab kebutuhan puskesmas yang menuju ke BLUD akan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sudah dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan peraturan BLUD. Berdasarkan test / evaluasi yang dirancang untuk menilai kesuksesan pelaksanaan acara pelatihan ini, terlihat ada peningkatan pengetahuan peserta.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki dikarenakan tidak semua pejabat BLUD penyusun laporan keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Mayoritas tenaga bendahara dan

penyusun laporan keuangan pada puskesmas BLUD dijabat oleh seorang tenaga kesehatan yang juga melakukan kegiatan pelayanan kesehatan pada puskesmas tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada Ketua UPM Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat dan Dinas Kesehatan terutama UPTD Puskesmas di Kabupaten Banyuasi terutama Puskesmas Lumpatan yang bersedia menyediakan tempat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, S. S., 2015. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Edisi kesebelas, Rajawali Pers, Jakarta
- Kieso & Weygand, 2015. Akuntansi Intermediate, Edisi 1, Erlangga
- Rivai, V. (2013). Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik Edisi 1. Cetakan 1. Jakarta: Rajawali Pers
- Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pencatatan Akuntansi Berbasis Akrua Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 13 Tahun 2015
- UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara